

Indikator Kinerja Utama
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Makna: Merupakan jumlah hasil produksi perikanan tangkap di laut dan perairan umum daratan yang dihasilkan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun n (tahun berjalan). Alasan: Untuk mengetahui dampak keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan terhadap efek capaian produksi perikanan yang dihasilkan oleh nelayan di laut maupun di perairan umum daratan selama satu tahun berjalan. Cara Perhitungan: $A = B + C$ Dimana : A = Produksi Perikanan Tangkap Pada Tahun n B = Σ Produksi Perikanan Tangkap di Laut Pada Tahun n C = Σ Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Daratan Pada Tahun n	Kepala Dinas	Bidang Perikanan Tangkap

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya Dari Seluruh Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	Makna: Merupakan jumlah hasil produksi perikanan budidaya air tawar dan perikanan budidaya air payau dan budidaya air laut yang dihasilkan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun n (tahun berjalan) Alasan: Untuk mengetahui dampak keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan terhadap efek capaian produksi perikanan yang dihasilkan oleh pembudidaya air tawar dan pembudidaya air payau dan budidaya air laut selama satu tahun berjalan. Cara Perhitungan: $A = B + C$ Dimana : A = Produksi Perikanan Budidaya Pada Tahun n B = Σ Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Pada Tahun n C = Σ Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Budidaya Air Laut Pada Tahun n	Kepala Dinas	Bidang BP2HP

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
3.a	Meningkatnya Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Makna : NTNP merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib) yang dihasilkan pada tahun n (tahun berjalan). Alasan : Nilai Tukar Perikanan digunakan sebagai alat pengukur tingkat kemampuan/daya beli nelayan, baik nelayan tangkap maupun nelayan pembudidaya. Nilai Tukar Perikanan digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur kesejahteraan pelaku usaha yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima dengan harga yang dibayarkan oleh pelaku usaha Cara Perhitungan: $NTNP = \frac{It \text{ NTNP}}{Ib \text{ NTNP}} \times 100\%$ dimana : It NTNP = Indeks Harga yang Diterima oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) Ib NTNP = Indeks Harga yang Dibayar oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)	Kepala Dinas	BPS Prov. Kal-Sel

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
3.b		Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Makna : Nilai ekspor hasil perikanan adalah nilai total dari komoditas perikanan yang diekspor ke luar negeri. Nilai ekspor ini dapat menjadi indikator untuk meningkatkan kualitas sektor perikanan, baik dari segi sumber daya maupun teknologi. Alasan : Kegiatan ekspor menjadi bagian yang penting dari upaya pemerintah untuk mengembangkan industry kelautan dan perikanan. Komoditas yang dikirim untuk pasar ekspor juga menjadi pertimbangan untuk mengembangkan industry perikanan sesuai dengan kebijakan pembangunan sector kelautan dan perikanan. Cara Perhitungan: Nilai Ekspor = Σ Volume Komoditi Perikanan Yang Tercatat di BKI Kal-Sel pada tahun n	Kepala Dinas	BKI Prov. Kal-Sel

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
4.	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Makna : Angka Konsumsi Ikan (AKI) adalah ukuran atau indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram per kapita per tahun. Alasan : Ikan merupakan sumber protein penting dalam komposisi menu makanan masyarakat di Kalimantan Selatan, sehingga ikan dapat dijadikan salah satu komoditas untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan gizi. Cara Perhitungan Untuk AKI : $\text{AKI Kal-Sel} = \frac{\text{Jumlah AKI Kab/Kota di Kal-Sel}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Kal-Sel}}$ Untuk mendapatkan Angka Konsumsi Ikan digunakan rumus : $\text{AKI} = A + B + C$ A adalah Konsumsi Ikan di dalam rumah tangga B adalah Konsumsi Ikan di luar rumah tangga C adalah Konsumsi Ikan yang tidak tercatat	Kepala Dinas	Bidang BP2HP

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
5.	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut	Luas Kawasan Ekosistem Pesisir Kritis Yang Telah Direhabilitasi	Makna : Merupakan akumulasi luas ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi sd tahun n. Kawasan ekosistem pesisir yang direhabilitasi adalah kawasan mangrove dan kawasan terumbu karang. Realisasi akumulasi luas kawasan kritis ekosistem wilayah pesisir ditentukan berdasarkan aksi kegiatan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang dilaksanakan sd. tahun n. Alasan: Kerusakan ekosistem laut sudah terjadi hampir diseluruh wilayah pesisir, karena kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih rendah. Terumbu karang dan mangrove merupakan bagian dari ekosistem laut yang sangat berperan penting dalam kelestarian sumberdaya hayati di laut, jika terjadi kerusakan pada terumbu karang dan mangrove maka akan berpengaruh pada menurunnya keanekaragaman hayati. Sehingga perlu adanya langkah-langkah dalam menanggulangi masalah kerusakan ekosistem laut tersebut, salah satunya melalui rehabilitasi kawasan yang rusak Cara Perhitungan : Luas Akumulasi = A + B Dimana : A adalah Total Luas Kawasan Yang Direhabilitasi sd. tahun n-1 (data realisasi tahun 2024) B adalah Total Luas Kawasan Yang Direhabilitasi pada tahun n (data realisasi tahun 2025)	Kepala Dinas	Bidang PRL

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
6.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku	Makna : Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku adalah persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperiksa kepatuhannya pada tahun n, dengan satuan hitung %. Data persentase kepatuhan diperoleh pada saat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha kelautan dan perikanan. Pelaku usaha di bidang perikanan terdiri dari: - Pemanfaat Ruang Laut sd. 12 mil - Nelayan Laut sd. 12 mil yang memiliki kapal izin provinsi - Pembudidaya ikan di wilayah perairan laut sd. 12 mil. - Nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya. - Pembudidaya ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah perairan sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya. - Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan. Alasan : Pelaku usaha di bidang perikanan dapat dikatakan patuh apabila dalam menjalankan usahanya tersebut telah melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan dokumen utama yang harus dimiliki oleh pelaku usaha di bidang perikanan, yaitu wajib dilengkapi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).	Kepala Dinas	Bidang PSDKP

			Persyaratan tersebut berdasarkan: - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Cara Perhitungan : $= \frac{\sum_{i=1}^n (\frac{Ci}{Si} \cdot 100\%)}{n}$ Dimana: X_{psdp} = Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Per-UU Yang Berlaku Ci = Jumlah pelaku usaha perikanan yang patuh Si = Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa Kepatuhan		
--	--	--	---	--	--

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
7.a	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Makna : Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ukuran kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. IPP digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan kepuasan masyarakat. Alasan: Pelayanan publik di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Pelayanan publik juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cara Perhitungan : $\Sigma (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$	Kepala Dinas	Sekretariat

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
7.b		Indeks Kepuasan Masyarakat	Makna : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public selanjutnya Alasan: Untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodic terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik Cara Perhitungan : IKM disini merupakan rata-rata IKM per tahun yang berasal dari 7 Unit Penyelenggara Pelayanan di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Rata-rata IKM per tahun tersebut dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut : $IKM_{\text{rerata Tn}} = \frac{\Sigma \text{ Total IKM}_{\text{UPP Tn}}}{7}$ Dimana : $IKM_{\text{rerata Tn}}$ = IKM rata-rata pada tahun n $\Sigma \text{ Total IKM}_{\text{UPP Tn}}$ = Jumlah Total IKM tahun n pada 7 UPP pada UPTD Dislautkan 7 = Angka Konstanta Yang Merupakan Jumlah UPP di Dislautkan	Kepala Dinas	IKM UPTD

No	Kinerja Utama	Indikator	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
7.c		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan	Makna : Merupakan hasil inovasi pelayanan public yang diterapkan pada tahun n. Alasan : Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang dan jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public yaitu setiap institusi. Inovasi dibutuhkan dalam rangka memperbaiki bahkan meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, karena melalui inovasi dapat diciptakan sistem, metode, serta teknologi yang dapat menurunkan biaya, mempersingkat waktu layanan, memangkas birokrasi, dan yang terpenting memberikan kemudahan dalam pelayanan. Cara Perhitungan: Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan pada tahun n	Kepala Dinas	Sekretariat



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025**